

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA
ALOKASI UMUM (DAU), DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
TERHADAP BELANJA MODAL PEMERINTAH DAERAH
(PADA KAB/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE
2014-2016)**

SAFIUL HUDA

Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh (1) Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal, (2) Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal, (3) Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal, serta (4) pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal. Subjek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, dan objek penelitian adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 32 Kab/Kota di Jawa Tengah yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun 2014-2016 yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan pengujian hipotesis menggunakan t-statistik dan F-statistik serta koefisien determinasi.

Hasil penelitian memberikan informasi bahwa: (1) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal, (2) Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal, (3) Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, dan (4) secara bersama-sama Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Kata kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal

PENDAHULUAN

Setelah berjalan 17 tahun pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999

tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang efektif berlaku per Januari tahun 2001. Undang-Undang tersebut dalam

perkembangannya diperbarui dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tersebut, "Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan"¹. Hal ini menandai dimulainya era pembangunan secara mandiri. Urusan pemerintah pusat diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan. Kebijakan tersebut akan berdampak pada luasnya hak, kewenangan dan kewajiban yang dimiliki daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit campur dari pemerintah pusat.

Tujuan dari Otonomi Daerah adalah untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Pelimpahan wewenang di bidang penerimaan anggaran atau keuangan baik secara administrasi maupun pemanfaatan yang sebelumnya diatur atau dilakukan oleh pemerintah pusat menjadi kewenangan pemerintah

daerah dengan jumlah yang sangat signifikan adalah salah satu wujud pelaksanaan otonomi daerah tersebut. Otonomi Daerah menciptakan kemandirian untuk membangun daerah secara optimal dan tidak lagi terkonsentrasi di pusat sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Berdampak pada optimalnya potensi pendapatan daerah serta memberikan porsi belanja daerah yang lebih besar untuk sektor-sektor yang produktif.

Hal ini memberikan peluang bagi daerah untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangannya dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah secara efektif dan efisien. Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib dengan mempertimbangkan asas keadilan dan kepatuhan². Wujud kemandirian daerah untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangannya tersebut dijabarkan melalui desentralisasi fiskal.

Di Indonesia pelaksanaan desentralisasi fiskal memunculkan persoalan baru dikarenakan tingkat kesiapan fiskal dari masing-masing daerah berbeda. Daerah yang kaya dengan potensi keuangan akan memiliki sumber pendanaan daerah yang semakin besar sehingga daerah tersebut akan semakin maju, sehingga bertolak belakang bagi daerah dengan

¹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

² Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

potensi yang kurang. Dengan adanya otonomi daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota, maka pengelolaan keuangan sepenuhnya berada di tangan daerah itu sendiri kemudian dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tentunya menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan tugas pembangunan.

Dengan diberlakukannya desentralisasi fiskal tersebut, salah satu provinsi dengan jumlah penduduknya terbanyak di Indonesia yaitu Provinsi Jawa Tengah pun harus mencari atau menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengoptimalkan potensi sumber pajak lain dikarenakan realisasi PAD nya tidak mancapai target. Tidak tercapainya target PAD tersebut disebabkan oleh gagalnya pencapaian target pajak daerah, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Khusus pembangunan infrastruktur di Provinsi Jawa Tengah, wakil ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Jawa Tengah, mengatakan bahwa infrastruktur khususnya jalan raya menjadi persoalan serius di wilayah Jawa Tengah. Peralnya, wilayah dengan penduduk 35 juta jiwa tersebut dipersiapkan sebagai salah satu provinsi yang bakal menampung ratusan industri. Sehingga Provinsi Jawa Tengah akan dilirik banyak

investasi jika infrastrukturnya siap³. Secara umum, kepeminatan investor di Jawa Tengah di dominasi oleh industri padat karya, sehingga perlu banyak pembangunan infrastruktur yang menunggangnya. Tahun 2016 telah dicanangkan sebagai tahun pembangunan, sehingga pemerintah berupaya keras dalam percepatan pembangunan terutama pada pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, rel kereta api, pelabuhan, dan bandar udara.

Sedangkan setiap daerah memiliki kemampuan yang tidak sama dalam hal mendanai segala bentuk kegiatan operasionalnya, akibatnya timbul ketimpangan fiskal (*fiscal gap*) antar daerah. Untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal (*fiscal gap*) dan adanya kebutuhan pendanaan daerah yang cukup besar, maka pemerintah pusat memberikan Dana Perimbangan. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah. Dana transfer tersebut digunakan secara efektif dan efisien oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada publik. Pemerintah pusat telah menghimbau kepada seluruh

3

<http://semarang.bisnis.com/read/20160413/2/86436/infrastruktur-jadi-pr-besar-di-jawa-tengah> (Diakses tanggal 14 April 2017)

pemerintah daerah untuk menggunakan DAK harus tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat daerah, sehingga pengalokasiannya harus ditujukan kepada program-program prioritas. Namun faktanya, banyak proyek pembangunan yang yang dibiayai oleh DAK terbengkalai karena kurang tepat sasaran atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat⁴. Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Otonomi daerah tidak bisa terlepas dari pelaksanaan pembangunan daerah. Karena merupakan wujud upaya peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dalam menjalankan roda pemerintahannya. Pembangunan daerah tidak mungkin terwujud tanpa adanya pembangunan fisik berupa sarana dan prasarana. Pembangunan fisik dapat dilaksanakan jika perencanaannya dimasukkan kedalam APBD pada pos belanja, khususnya belanja modal. Alokasi belanja modal diperuntukkan untuk memenuhi sarana dan prasarana untuk memperlancar pelaksanaan tugas pemerintah, sehingga meningkatnya pelayanan kepada masyarakat. Secara umum, belanja modal dialokasikan untuk perolehan aset tetap yang dapat digunakan sebagai sarana pembangunan daerah.

4

<http://kabarnusantara.net/2016/09/23/dpd-minta-alokasi-dak-tepat-sasaran/> (Diakses tanggal 10 April 2017)

Beberapa pertimbangan yang menjadi latar belakang penulis dalam penyusunan penelitian ini antara lain adanya kecenderungan naiknya porsi belanja modal pemerintah daerah yang tidak dibarengi dengan peningkatan pembangunan dan masih tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, serta pengaruh sumber-sumber pendapatan pemerintah daerah terhadap belanja modal. Berdasarkan paparan tersebut, penelitian ini dibuat dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah (Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2014-2016)”**.

Berdasarkan uraian pembatasan masalah yang dikemukakan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal.
2. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Modal.
3. Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja Modal.
4. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Landasan Teori Dan Hipotesis

Belanja Modal

Pengertian Belanja Modal menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah asset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset⁵. Sedangkan menurut Abdul Halim yang dimaksud dengan belanja modal adalah sebagai berikut, Belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum⁶.

Selain itu, Nuramalia Hasanah dan Achmad Fauzi (2015) mengatakan bahwa, Belanja yang bersifat kebutuhan publik secara fisik memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun. Belanja modal menampung seluruh pengeluaran negara yang dialokasikan untuk pembelian barang-barang kebutuhan investasi (dalam bentuk aset tetap dan aset lainnya)⁷.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

⁶ Abdul Halim., *op. cit.*

⁷ Nuramalia Hasanah dan Achmad Fauzi, *Akuntansi Pemerintahan*, (Jakarta: LPP UNJ, 2015), p. 33

Menurut Abdul Halim dan Muhammad S Kusufi (2014), memberikan pengertian bahwa, PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu sebagai berikut:

- a. Pajak daerah
- b. Retribusi daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan
- d. Lain-lain PAD yang sah⁸.

Menurut Elita Dewi (2002) yang membahas tentang identifikasi sumber pendapatan daerah, dijelaskan bahwa identifikasi sumber pendapatan asli daerah adalah; meneliti, menentukan dan menetapkan mana sesungguhnya yang menjadi sumber pendapatan asli daerah, dengan cara meneliti dan mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan tersebut dengan benar sehingga memberikan hasil yang maksimal⁹.

Dana Alokasi Umum

Berdasarkan UU Nomor 33 tahun 2004 disebutkan bahwa Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan

⁸ Abdul Halim, dan Muhammad S Kusufi, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi 4 (Jakarta: Salemba Empat, 2014), p. 101

⁹ Elita Dewi, *Jurnal Ilmiah Identifikasi Sumber Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah*, (Sumatera Utara: USU, 2002).

antar-daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi¹⁰. Sedangkan Darise (2009) menyatakan bahwa, DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk pemerataan dan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah¹¹.

Dana Alokasi Khusus

Berdasarkan UU Nomor 33 tahun 2004, disebutkan bahwa Dana Alokasi Khusus selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional¹². Darise (2009), mengemukakan bahwa “DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan”¹³. Sedangkan Halim (2002), berpendapat bahwa “DAK

adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu”¹⁴.

Kajian Penelitian yang Relevan

Sebagai landasan dan acuan penelitian, peneliti menggunakan hasil penelitian terdahulu yang telah teruji secara empiris sehingga dapat memperkuat dalam hasil penelitian ini.

Pada penelitian Askam Tuasikal (2008), dengan variabel independennya berupa Dana Perimbangan, PAD, dan PDRB terhadap Belanja Modal sebagai variabel dependennya pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia memberikan kesimpulan bahwa secara simultan dana perimbangan, PAD, dan PDRB berpengaruh positif terhadap Belanja modal. Penelitian yang telah dilakukan oleh Ramadhana Puspita Sari (2014) pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan DIY memberikan hasil bahwa PAD, DAU, dan DAK berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Sedangkan penelitian Pungky Ardhani (2011) dengan variabel independennya Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU dan DAK serta Belanja Modal sebagai variabel dependen, menyatakan bahwa PAD dan DAU berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, sedangkan Pertumbuhan

¹⁰ *Ibid.*,

¹¹ Nurlan Darise, *Pengelolaan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)*, (Jakarta: Indeks, 2009), p. 38

¹² *Ibid.*

¹³ Nurlan Darise, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Edisi 2, (Jakarta: Indeks, 2009).

¹⁴ Abdul Halim, *op.cit.* p. 65

Ekonomi dan DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

PAD merupakan sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah dalam rangka menciptakan infrastruktur daerah. PAD didapatkan dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. PAD sebagai sumber penerimaan daerah perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan¹⁵. Masa desentralisasi saat ini, pemerintah daerah harus mampu mengembangkan dan meningkatkan PADnya dengan cara memaksimalkan sumber daya yang dimiliki supaya mampu membiayai segala kegiatan baik infrastruktur ataupun sarana prasarana daerah melalui alokasi belanja modal pada APBD.

Daerah yang memiliki sarana dan prasarana yang memadai akan berdampak pada meningkatnya tingkat produktivitas masyarakat dan akan menarik investor untuk menanamkan modalnya pada daerah tersebut yang akhirnya akan meningkatkan PAD itu sendiri. Peningkatan belanja modal

diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD¹⁶. Dengan peningkatan PAD diharapkan mampu memberikan efek positif terhadap anggaran belanja modal oleh pemerintah. Selain itu, diharapkan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pada gilirannya meningkatkan partisipasi atau kontribusi publik terhadap pembangunan daerah yang tercermin pada peningkatan PAD.

H1: PAD berpengaruh terhadap belanja modal

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

DAU merupakan salah satu dari Dana Perimbangan yang disediakan oleh pemerintah pusat yang bersumber dari APBN, dengan tujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah demi mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pemerintah daerah banyak yang mengandalkan DAU dikarenakan kemampuan keuangannya lemah sehingga DAU digunakan untuk membiayai segala kegiatan pemerintahannya, karena DAU merupakan salah satu sumber pendanaan bagi daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. DAU merupakan bantuan umum yang tidak dikaitkan dengan program pengeluaran

¹⁵ Nurlan Darise, *Pengelolaan Keuangan Daerah*. (Jakarta. PT Indeks, 2006), p. 43

¹⁶ Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. (Yogyakarta: Andi, 2002)

tertentu. Tujuan bantuan ini adalah untuk menyediakan dana yang cukup bagi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsinya dan menyediakan pelayanan publik¹⁷. Selain itu, DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan daerah termasuk jaminan kesinambungan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat dan merupakan satu kesatuan dengan penerimaan umum APBD¹⁸. Setiap transfer DAU yang diterima daerah akan ditujukan untuk belanja pemerintah daerah. Sehingga melalui alokasi dana perimbangan (DAU, DAK dan DBH) dalam bentuk alokasi belanja daerah baik untuk belanja rutin dan belanja modal, pemerintah daerah dapat menentukan skala prioritas dalam alokasi anggaran tersebut¹⁹.

H2: DAU berpengaruh terhadap belanja modal.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

DAK merupakan salah satu Dana Perimbangan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional. Tujuan tersendiri dari DAK adalah

¹⁷ Indra J. Piliang, Dkk. *Otonomi Daerah: Evaluasi dan Proyeksi*. (Jakarta: Yayasan Harkat Bangsa, 2003) h 93.

¹⁸ HAW. Wijaya. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008) h. 33

¹⁹ Timbul H. Simanjuntak dan Mukhlis. *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam pembangunan Ekonomi*. (Jakarta: Raih Asa Sukse, 2012) h. 206.

untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Melalui alokasi dana perimbangan (DAU, DAK dan DBH) dalam bentuk alokasi belanja daerah baik untuk belanja rutin dan belanja modal, pemerintah daerah dapat menentukan skala prioritas dalam alokasi anggaran tersebut²⁰. Secara khusus DAK digunakan untuk membiayai Belanja Modal yaitu investasi pengadaan dan atau peningkatan prasarana dan sarana fisik dengan umur ekonomis panjang²¹. DAK dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan²².

H3: DAK berpengaruh terhadap belanja modal

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

²⁰ Timbul Simanjuntak dan Imam Mukhlis, *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2012) p. 206

²¹ HAW. Wijaya, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008) p. 34

²² B.N. Marbun. *Otonomi Daerah 1945-2005 Proses dan Realita*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005) h 176

APBD memuat prioritas-prioritas pembangunan, terutama prioritas kebijakan dan target yang akan dicapai melalui belanja daerah (belanja modal) sesuai sumber daya yang tersedia, baik melalui pendapatan asli daerah ataupun melalui skema transfer dana perimbangan (DAU, DAK, dan DBH) dari pemerintah pusat²³. Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik²⁴. Menurut Sidik (2002), salah satu ciri yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terdapat pada kemampuan keuangan daerah. Dengan arti, daerah otonom harus memiliki kewenangan serta kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya.

H4: PAD, DAU dan DAK berpengaruh terhadap belanja modal

Metode Penelitian

²³ Entarina Simanjuntak, Dkk. Pemantauan Pelaksanaan Investasi Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum. (Jakarta: Kajian Kementerian PU).

²⁴ HAW. Wijaya. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) h. 129

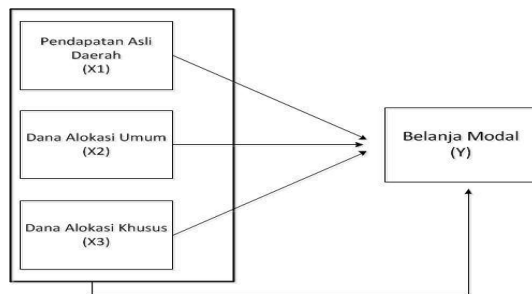
Penelitian dibatasi hanya pada pembahasan mengenai pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2016. Peneliti memilih Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Tengah sebagai sampel dalam penelitian, sedangkan periode tahun yang digunakan oleh peneliti adalah tahun 2014-2016. Adapun penggunaan sampel lebih lanjut bergantung kepada pemenuhan persyaratan, seperti :

- a. Seluruh kabupaten/kota pada Provinsi Jawa Tengah mencantumkan jumlah PAD, DAU, DAK dan Belanja Modal pada Laporan Realisasi APBD.
- b. Karakteristik kemampuan keuangan dan geografis yang relatif sama.

Data yang digunakan peneliti sekaligus menjadi objek yang diolah lebih lanjut adalah berupa data sekunder yang berasal dari Laporan Realisasi APBD untuk memperoleh variabel bebas yaitu PAD (X_1), DAU (X_2), dan DAK (X_3) serta guna memperoleh variabel terikat yakni Belanja Modal (Y). Laporan Realisasi APBD tersebut diperoleh dari *website* Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yaitu www.djpk.kemenkeu.go.id. Jumlah Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah berjumlah 35 kab/kota, namun setelah melakukan uji *Isaac and Michael* dengan taraf kesalahan 5%, maka sampel menjadi sebesar 32 kab/kota.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan dengan model regresi berganda, disebut regresi berganda karena banyak faktor (variabel) yang mempengaruhi variabel terikat.

Sesuai dengan hipotesis yang telah diajukan, maka konstelasi penelitian ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1 konstelasi penelitian

Sumber: Data Diolah Peneliti

Persamaan Regresi Ganda

Analisis regresi ganda menurut Sugiyono (2012:277) digunakan untuk menaksir atau meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Dimana fungsi dapat dinyatakan dengan bentuk persamaan²⁵.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana:

Y= Belanja Modal (BM)

²⁵ Damodar N Gujarati, *Basic Econometrics*, (USA: Mc Graw Hill, 2003), p. 181

X₁= Pendapatan Asli Daerah (PAD)

X₂= Dana Alokasi Umum (DAU)

X₃= Dana Alokasi Khusus (DAK)

α= Konstanta

β= Slope atau koefisien regresi

e= Error

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Uji Statistik Deskriptif

Dalam uji statistik deskriptif, peneliti dapat memberikan gambaran atau sebuah deskripsi dari suatu data yang dilihat melalui sisi nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum serta *variance*. Dengan menggunakan program SPSS Versi 23, Berikut hasil uji statistik deskriptif :

Tabel 1 Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics						
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
PAD	32	152	370	226,97	53,206	2830,870
DAU	32	418	1336	875,78	205,807	42356,499
DAK	32	45	241	111,66	53,479	2860,039
BM	32	154	532	287,97	88,305	7797,773
Valid N (listwise)	32					

Sumber: Data Diolah Peneliti

Variabel yang memiliki nilai minimum tertinggi adalah DAU sebesar 418, sedangkan nilai minimum terendah adalah DAK sebesar 45. Selanjutnya nilai maksimum tertinggi yaitu DAU sebesar 1.336 sedangkan nilai maksimum terendah adalah DAK sebesar 241. Kemudian nilai rata-rata tertinggi juga DAU sebesar 875,78 sedangkan nilai rata-rata terendah adalah DAK sebesar 111,66. Berikutnya, nilai standar deviasi tertinggi adalah DAU sebesar 205.807 sedangkan nilai standar deviasi terendah adalah PAD sebesar 53,206

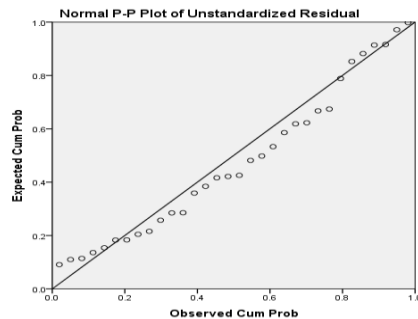
kemudian nilai variance tertinggi adalah DAU dan terendah adalah PAD.

Uji Persyaratan Analisis

Dalam penelitian ini, peneliti terlebih dahulu menganalisis data dengan menggunakan uji persyaratan analisis yang memiliki tujuan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak.

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah dalam variabel pengganggu atau residualnya dapat terdistribusi secara normal atau tidak. Peneliti menggunakan Uji *Kolmogorov-Smirnov*. Besaran *Kolmogorov-Smirnov* adalah 0,135 dengan tingkat signifikansi 0,147. Tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05, hal ini mengartikan bahwa penyebaran data terdistribusi secara normal. Selain itu, peneliti juga melakukan uji normal *Probability Plot* untuk melihat data berdistribusi normal atau tidak. Berikut uji normal *Probability Plot* yang telah peneliti lakukan:



Gambar II Grafik Normal P-P Plot

Sumber: Data Diolah Peneliti

Berdasarkan hasil pengujian diatas, dapat dilihat bahwa titik-titik data tidak menjauhi garis diagonal atau penyebaran titik-titik berada pada sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka dapat ditarik kesimpulan bahwa data pada penelitian ini berdistribusi normal.

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinieritas

Nilai dalam tabel VIF menunjukkan jumlah yang kurang dari 10,0 untuk masing-masing variabelnya, yaitu dengan nilai PAD sebesar 1,323, DAU sebesar 1,563 dan DAK sebesar 1,210. Hal ini terlihat jelas bahwa tidak terjadi multikolinieritas.

Uji Autokorelasi

Untuk menguji apakah terdapat korelasi maka dilakukan juga Uji *Durbin-Watson* dengan model regresi $dU < dW < 4-dU$. Untuk taraf signifikansi sebesar 0,05 dengan jumlah sampel (n) 32 dan 3 variabel independen (k=3), didapat nilai dL sebesar 1,2437 dan dU sebesar 1,6505 maka $4-dU$ sebesar 2,3495. Hasil uji Autokorelasi dengan menggunakan uji *Durbin-Watson* yang telah dilakukan peneliti diperoleh dengan hasil $dU < DW < 4-dU = 6505 < 2,059 < 2,3495$. Maka dapat dikatakan hasil analisa menunjukkan tidak adanya autokorelasi dalam data sampel.

Uji Heteroskedastisitas

Dalam hal ini peneliti melakukan dengan uji *Glejser*. Prediksi dilakukan dengan meregresikan independen dengan *variable absolute residual* bahwa dari tiga variabel independen yaitu PAD, DAU dan DAK menunjukkan nilai signifikansi lebih dari 0,05 masing-masing 0,628, 0,416 dan 0,445. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Berganda

Berdasarkan hasil analisis regresi yang dihasilkan maka menghasilkan juga persamaan model regresi seperti:

$$Y = 51,953 + 0,386 X_1 + 0,150 X_2 + 0,154 X_3 + e$$

Dari persamaan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Konstanta sebesar 51,953 memiliki makna ketika PAD, DAU dan DAK setara dengan nol maka belanja modal memiliki nilai 51,953.
- b) Koefisien variabel PAD sebesar 0,386 memiliki makna ketika PAD meningkat 1 satuan dan variabel lain mempunyai nilai 0, maka belanja modal akan bertambah sebesar 0,386.
- c) Koefisien variabel DAU sebesar 0,150 memiliki makna ketika DAU meningkat 1 satuan dan variabel lain mempunyai nilai 0 maka belanja modal akan bertambah sebesar 0,150.
- d) Koefisien variabel DAK sebesar 0,154 memiliki makna ketika DAK meningkat 1 satuan dan variabel lain mempunyai nilai 0

maka belanja modal akan bertambah sebesar 0,154.

Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji t)

Pengujian pengaruh PAD terhadap Belanja Modal

Berdasarkan penghitungan diatas t_{hitung} untuk PAD sebesar 2,481 kemudian t_{table} diketahui dengan signifikansi 0,05 dengan df (n-k-1) atau $32-3-1 = 28$, dapat diketahui t_{tabel} sebesar 2,048. maka dapat diketahui $t_{hitung} 2,481 > t_{tabel} 2,048$ sehingga dapat disimpulkan bahwa PAD secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Pengujian pengaruh DAU terhadap Belanja Modal

Berdasarkan penghitungan diatas t_{hitung} untuk DAU sebesar 3,161 kemudian t_{table} diketahui dengan signifikansi 0,05 dengan df (n-k-1) atau $32-3-1 = 28$, dapat diketahui t_{table} sebesar 2,048. maka dapat diketahui $t_{hitung} 3,161 > t_{table} 2,048$ sehingga dapat disimpulkan bahwa DAU secara parsial berpengaruh Belanja Modal.

Pengujian pengaruh DAK terhadap Belanja Modal

Berdasarkan penghitungan diatas t_{hitung} untuk DAK sebesar 1,481 kemudian t_{table} diketahui dengan signifikansi 0,05 dengan df (n-k-1) atau $32-3-1=28$, dapat diketahui t_{table} sebesar 2,048. maka dapat diketahui $t_{hitung} 1,481 < t_{table} 2,048$. Maka dapat disimpulkan bahwa DAK secara

parsial tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Uji Koefisien Regresi Simultan (Uji F)

Menghasilkan F_{hitung} sebesar 3,902 sedangkan F_{tabel} dapat diketahui pada tabel statistik dengan signifikansi 0,05 dimana $df (k; n-k)$. k merupakan jumlah variabel bebas dan n merupakan jumlah sampel, $df (3; 29)$ kemudian didapat F_{tabel} sebesar 2,93. Dapat diketahui $F_{hitung} 3,902 > F_{tabel} 2,93$. Artinya PAD, DAU dan DAK secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap Belanja Modal, kemudian nilai signifikansi $0,019 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan PAD, DAU dan DAK berpengaruh terhadap Belanja Modal dan dapat digeneralisasi untuk seluruh populasi selain yang terdapat di Kab/Kota Jawa Tengah.

Uji Korelasi Ganda

Uji Korelasi Simultan

Diketahui dengan melihat nilai R yaitu 0,543 hal tersebut berarti bahwa nilai R termasuk dalam kategori 0,400 – 0,600 maka keeratan PAD, DAU dan DAK terhadap Belanja Modal tergolong sedang.

Uji Korelasi Parsial

Uji korelasi X_1 terhadap Y

Dalam penelitian ini, untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap Belanja Modal (BM) menggunakan korelasi parsial. Diketahui koefisien korelasi antara

PAD terhadap BM adalah sebesar 0,789 yang berarti bahwa PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal dan berdasarkan pada pedoman interpretasi koefisien korelasi termasuk kedalam kategori kuat.

Uji Korelasi X_2 Terhadap Y

Diketahui koefisien korelasi antara dana alokasi umum (DAU) terhadap belanja modal (BM) adalah sebesar 0,389 yang berarti bahwa dana alokasi umum (DAU) berpengaruh positif terhadap belanja modal (BM) dan tingkat hubungannya berdasarkan pada pedoman interpretasi koefisien korelasi termasuk kedalam kategori rendah.

Uji Korelasi X_3 Terhadap Y

Diketahui koefisien korelasi antara dana alokasi khusus (DAK) terhadap belanja modal adalah sebesar 0,098 yang berarti bahwa dana alokasi khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap belanja modal (BM) dan tingkat hubungannya berdasarkan pada pedoman interpretasi koefisien korelasi termasuk kedalam kategori sangat rendah.

Uji Koefisien Determinasi

Diketahui nilai *R-Square* atau pengaruh antara PAD, DAU dan DAK terhadap Belanja Modal sebesar 0,295. Jadi kemampuan dari variabel PAD, DAU dan DAK untuk menjelaskan Belanja Modal secara simultan sebesar 29,5%.

Pembahasan

Berikut ini penjelasan mengenai pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen:

Pengaruh PAD terhadap Belanja Modal

Berdasarkan perhitungan uji korelasi parsial diperoleh koefisien korelasi antara PAD dengan Belanja Modal adalah sebesar 0,789. Kemudian berdasarkan hasil uji signifikansi koefisien korelasi (uji t) dapat diketahui t hitung 2,481 dan t_{tabel} sebesar 2,084. Sehingga t hitung lebih besar daripada t_{tabel} dan tingkat signifikansi sebesar $0,019 < 0,05$. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan mengenai uji hipotesis secara parsial dari variabel X_1 terhadap variabel Y, sebagai berikut:

H_1 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal (BM).

Hasil penelitian ini konsisten terhadap penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Askam Tuasikal (2008) bahwa PAD berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal secara signifikan. Dengan alasan bahwa PAD merupakan sumber utama pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari sumber-sumber kekayaan dalam wilayah atau daerah itu sendiri dan PAD juga merupakan indikator untuk menilai kemandirian suatu daerah dan tolak ukur untuk keberhasilan

pemerintah daerah dalam hal pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pemberian pelayanan publik kepada masyarakat.

Pengaruh DAU terhadap Belanja Modal

Diketahui koefisien korelasi antara DAU terhadap belanja modal adalah sebesar 0,389. Kemudian berdasarkan uji t dapat diketahui t_{hitung} 3,161 dan t_{tabel} sebesar 2,084. Sehingga t_{hitung} lebih besar daripada t_{tabel} dan signifikansi sebesar $0,004 < 0,05$. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan mengenai uji hipotesis secara parsial dari variabel X_2 terhadap variabel Y, sebagai berikut:

H_2 : Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal (BM).

Sependapat dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Wiwin Anggriani Salawali, dkk (2016). Hasil temuan ini juga mendukung temuan sebelumnya yaitu Ni Luh Dina Selvia Martini, dkk (2014) yang menyatakan bahwa DAU sangat berpengaruh terhadap belanja modal. Pengaruh tersebut disebabkan karena adanya DAU dari pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah mampu mengalokasikan pendapatannya tersebut untuk membiayai belanja modal²⁶.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap belanja modal. DAU adalah salah satu sumber pendapatan daerah

²⁶ Ni Luh Dina Selvia Martini, dkk. *Loc. cit.*

yang berasal dari pemerintah pusat yang dialokasikan untuk mendanai kebutuhan operasional daerah. Jumlah transfer DAU dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah merupakan dana transfer pemerintah yang paling besar yang di peroleh pemerintah daerah. Bahkan besarnya bisa melebihi nilai PAD yang dimiliki oleh daerah tersebut.

Pengaruh DAK terhadap Belanja Modal

Diketahui koefisien korelasi antara DAK terhadap belanja modal adalah sebesar 0,098. Kemudian berdasarkan perhitungan uji t dapat diketahui t_{hitung} 1,481 dan t_{table} sebesar 2.084. Sehingga t_{hitung} lebih kecil daripada t_{table} dan signifikan sebesar $0,149 > 0,05$. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan mengenai uji hipotesis secara parsial dari variabel X_3 terhadap variabel Y, sebagai berikut:

H_3 : Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal (BM).

Sependapat dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Natalie Trisnawati dan Vidya Vitta (2015). Pendapat yang sama juga telah ditemukan oleh Agus Budi S dan Mohamad Ainur Rofiq (2013) di provinsi jawa timur bahwa DAU tidak berpengaruh terhadap belanja modal yaitu nilai *standardized coefisient* sebesar -0,084²⁷.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa DAK tidak berpengaruh

terhadap belanja modal. DAK juga merupakan dana yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang digunakan secara khusus untuk program-program prioritas pemerintah pusat dalam rangka pembangunan nasional sehingga diharapkan pembangunan secara fisik di daerah setiap tahunnya meningkat pula. Dalam kenyataanya dengan jumlah DAK yang diterima Pemerintah daerah cukup besar tidak diimbangi dengan efektifnya tatakelola implementasi DAK bagi pembangunan di daerah. Justru DAK yang begitu besar diterima oleh pemerintah daerah masih banyak dialokasikan untuk belanja pegawai.

Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap Belanja Modal

Berdasarkan perhitungan Uji F diketahui bahwa F_{hitung} sebesar 3,902 sedangkan F_{table} dapat diketahui pada tabel statistik dengan signifikansi 0,05 dimana df (k; n-k). k merupakan jumlah variabel bebas dan n merupakan jumlah sampel, df (3;29) kemudian didapat F_{tabel} sebesar 2,93. Dapat diketahui F_{hitung} $3,902 > F_{tabel}$ 2,93. Dan berdasarkan pengujian determinasi diketahui nilai *R-Square* atau pengaruh antara PAD, DAU dan DAK terhadap Belanja Modal sebesar 0,295 (29,5%). Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan mengenai uji hipotesis secara bersama-sama dari variabel X_1 , X_2 , dan X_3 terhadap variabel Y, sebagai berikut:

H_1 : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal (BM)..

²⁷ Agus Budi Santosa dan Mohamad Ainur Rofiq, *loc. cit.*

Sejalan dengan hasil penelitian Askam Tuasikal (2008) dengan penelitian Ni Luh Dina Selvia Martini (2014), Hasil penelitiannya menunjukkan ada pengaruh positif dan signifikan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal. Hal ini ditunjukkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa semakin besar PAD, DAU dan DAK sebagai sumber penerimaan daerah maka semakin besar pula dana yang dikeluarkan untuk belanja modal. Dikarenakan untuk membiayai penyediaan kebutuhan publik sebagai salah satu unsur yang mendorong perubahan kualitas pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD, maka peran dana perimbangan yaitu DAU dan DAK sangat signifikan untuk membiayai belanja daerah khususnya belanja yang menyediakan pelayanan publik yaitu belanja modal.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh serta pembahasan dari hasil penelitian, maka kesimpulan yang diperoleh peneliti adalah:

1. Hasil pengujian hipotesis membuktikan bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja modal. Artinya jika nilai pendapatan asli daerah

meningkat, maka nilai belanja modal tersebut juga akan meningkat dan begitupun sebaliknya.

2. Hasil pengujian hipotesis membuktikan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Dana alokasi umum bersifat *Block Grant*, sehingga memungkinkan daerah menggunakannya sesuai dengan prioritas kebutuhan daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka otonomi daerah.
3. Hasil pengujian hipotesis membuktikan bahwa dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Dikarenakan kebutuhan sulit diprediksi dengan rumus alokasi umum dan kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional.
4. Hasil pengujian hipotesis membuktikan bahwa ketiga variabel yaitu PAD, DAU dan DAK secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal. Hal ini disebabkan oleh adanya pendapatan daerah yang diperoleh baik yang berasal dari pendapatan asli daerah maupun dana perimbangan (DAU) untuk mendanai seluruh pengeluaran daerah khususnya kebutuhan-kebutuhan dalam meningkatkan pembangunan daerah yang dapat

mensejahterakan masyarakat daerahnya.

Implikasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka implikasi yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau gambaran untuk mengevaluasi kinerja dan anggaran pemerintah daerah agar menjadi lebih baik. Sebaiknya pemerintah daerah menggunakan dana transfer yang berupa DAU dengan tidak membelanjakannya secara boros, akan tetapi dapat memanfaatkannya dengan baik dan bijaksana. Dengan pemanfaatan DAU diharapkan pemerintah daerah dapat menggali sumber-sumber Dana Alokasi Khusus dan pendapatan asli daerah yang berpotensi menaikkan persentase penerimaan PAD dan menurunkan alokasi dari pemerintah pusat.
2. Langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dalam rangka untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut; Menghitung kembali potensi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing kab/kota, sehingga mampu menentukan target penerimaan pendapatan

yang dapat dicapai dan Melakukan evaluasi realisasi penerimaan pendapatan di instansi-instansi yang mengelola sumber pendapatan daerah, guna menentukan langkah pengoptimalan target pendapatan asli daerah pada tahun berikutnya.

3. Adanya pemberian transfer dana pemerintah pusat, terkadang menyebabkan rendahnya kewenangan pemerintah daerah dalam mengalokasikan belanja modal yang sesuai dengan kebutuhan daerahnya.

Rekomendasi

Berdasarkan implikasi di atas, peneliti memberikan beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna bagi beberapa pihak, diantaranya adalah:

1. Bagi pemerintah daerah, mengingat PAD memiliki pengaruh terhadap perkembangan belanja modal di Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah, maka peningkatan efektifitas dan efisiensi dalam sumber-sumber PAD harus lebih diintensifkan, terutama di sektor pajak dan retribusi daerah. Sedangkan dari sisi dana perimbangan perlu manajemen dan perencanaan yang baik pula guna memaksimalkan dana dari pemerintah pusat untuk membiayai pengeluaran pemerintah pada sektor publik.
2. Manajemen pengeluaran pemerintah daerah dalam bentuk

pos belanja modal perlu diprioritaskan pada peningkatan kesejahteraan publik yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

3. Bagi peneliti selanjutnya, agar kelak dapat menggunakan data yang lebih lengkap dengan rentang periode waktu penelitian yang lebih panjang sehingga dapat dilakukan generalisasi secara tepat atas hasil penelitian tersebut. Penelitian berikutnya juga diharapkan mampu meneliti variabel lainnya yang mempengaruhi belanja modal, seperti dana bagi hasil, PDRB, SILPA, dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Sukriy dan Abdul Halim. 2006. **Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan, Jurnal Akuntansi Pemerintahan.** Jakarta: Depertemen Keuangan.

Abdullah, Sukriy. 2009. **Pengaruh DAU dan PAD terhadap Belanja Pemerintah Daerah Studi Kasus Kab/Kota di Jawa dan Bali.** Yogyakarta: UGM.

Ardhani, Pungky. 2011. **PAD, DAU, dan DAK terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal, Jurnal Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi.** Semarang: UNDIP.

Arif, Bahtiar, Muchlis dan Iskandar. 2002. **Akuntansi Pemerintahan.** Jakarta: Salemba Empat.

Darise, Nurlan. 2006. **Pengelolaan Keuangan Daerah.** Jakarta: Indeks

_____. 2009. **Pengelolaan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).** Jakarta: Indeks.

_____. 2009. **Pengelolaan Keuangan Daerah.** Edisi 2. Jakarta: Indeks.

Dewi, Elita. 2002. **Jurnal Ilmiah Identifikasi Sumber Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah.** Sumatera Utara: USU.

DPD Minta Alokasi DAK Tepat Sasaran

<http://kabarnusantara.net/2016/09/23/dpd-minta-alokasi-dak-tepat-sasaran/>

Erlina, Omar Sakti R, dan Rasdianto. 2015. **Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual.** Jakarta: Salemba Empat.

Ghozali, Imam. 2009. **Ekonometrika Teori Konsep dan Aplikasi dengan SPSS 17.** Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Gujarati, N Damodar. 2003. **Basic Econometrics.** USA: Mc Graw Hill.

Halim, Abdul. 2002. **Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah,** Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat.

- Halim, Abdul. 2002. **Akuntansi Keuangan Daerah**. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul dan Muhammad S Kusufi. 2014. **Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah**, Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Hasanah, Nuramalia dan Achmad Fauzi. 2015. **Akuntansi Pemerintahan**. Jakarta: LPP UNJ.
- Infrastruktur Jadi PR Besar di Jawa Tengah
<http://semarang.bisnis.com/read/20160413/2/86436/infrastruktur-jadi-pr-besar-dijawa-tengah> Inilah 18 daftar Program Prioritas 2017
<http://kontan.co.id/news/inilah-18-daftar-program-prioritas-2017>. Jawa Tengah Diminta Gali Potensi Sumber Pajak lain
<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/05/27/o7tyb6361-jawa-tenga-diminta-gali-potensi-sumber-pajak-lain>
- Jokowi Diminta Perhatikan Pembangunan Infrastruktur Di Wilayah Timur
<http://m.beritasatu.com/ekonomi/232211-jokowi-diminta-perhatikan-pembangunan-infrastruktur-di-wilayah-timur/>
- Juwaini, Jazuli. 2007. **Otonomi Sepenuh Hati**. Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat.
- Keuangan. <http://jateng.bps.go.id>
- Kualitas Infrastruktur Indonesia Masih Rendah Penerapan Teknologi Dibutuhkan
<http://industri.bisnis.com/read/20160824/45/578140/kualitas-infrastruktur-indonesiamasih-rendah-penerapan-teknologi-dibutuhkan>
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. **Otonomi dan Pembangunan Daerah**. Jakarta: Erlangga.
- Marbun, B.N. 2005. **Otonomi Daerah 1945-2005: Proses dan Realita**. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Mardiasmo. 2002. **Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah**. Yogyakarta: ANDI.
- Oentarto, Dkk. 2004. **Menggagas Format Otonomi Daerah Masa Depan**. Jakarta: Samitra Media Utama.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Piliang, Indra J. dan Dendi Ramdani. 2003. **Otonomi Daerah: Evaluasi dan Proyeksi**. Jakarta: Yayasan Harkat Bangsa.
- Realisasi APBD.
www.djpk.kemenkeu.go.id
- Sabarno, Hari. 2007. **Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa**. Jakarta: Sinar Grafika.
- Santosa, Agus B. **Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap Belanja**

- Modal, Jurnal Bisnis dan Ekonomi.** Vol. 20 No 2. Semarang: Stikubank
- Saragih, Juli Panglima. 2003. **Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi.** Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sidiq, Machfud. 2002. **Format Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang Mengacu pada Pencapaian Tujuan Nasional.** Jakarta: Seminar Nasional, *Public Sector Scorecard.*
- Subowo, dan Endar Rosita Wati. 2010. **Hubungan antara PAD dan Dana Perimbangan dengan Belanja Modal Pemerintah Kudus, Jurnal Dinamika Akuntansi.** Vol. 2. Semarang: UNNES.
- Sugiyono. 2015. **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.** Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Syarifin, Pipin dan Dedah Jubaidah. 2005. **Hukum Pemerintahan Daerah.** Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Wijaya, HAW. 1998. **Percontohan Otonomi Daerah Di Indonesia.** Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. 2003. **Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh.** Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____. 2004. **Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom.** Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____. 2008. **Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU no. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.** Jakarta: Raja Grafindo Persada.